

ABSTRAK

Pengambilalihan saham merupakan salah satu bentuk restrukturisasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT). Kesepakatan atas pelaksanaan pengambilalihan saham dituangkan dalam perjanjian pengambilalihan saham yang dapat dibuat oleh atau dihadapan notaris, maupun para pihak. Beralihnya saham dan pengendalian terhadap perseroan dibuktikan melalui akta autentik yang dibuat oleh notaris. Seluruh akta sebagai bukti telah beralihnya saham perseroan akan didapat oleh pihak yang mengambilalih setelah kewajiban atas pembayaran pengambilalihan saham telah terpenuhi. Tetapi dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor Register Perkara : 52/Pdt.G/PN/Jkt.Pst pihak tergugat sebagai pengambilalih saham perseroan belum membayar penuh pembayaran atas saham tersebut, tetapi didalam akta tertulis seluruh saham atas perseroan sudah beralih dari pihak pertama kepada pihak kedua. Sehingga rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu : 1). Apakah sah perjanjian pengambilalihan saham perseroan terbatas yang belum dibayar penuh? 2). Apakah akibat hukum jika perjanjian atas pembayaran pengambilalihan saham belum dibayar penuh?. Metode yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah dengan menggunakan jenis penelitian hukum normatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan untuk menjawab rumusan masalah tersebut. Adapun hasil terhadap penelitian ini yaitu : 1). Perjanjian pengambilalihan saham dinilai sah karena telah memenuhi unsur sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHP, tetapi dalam pasca pelaksanaan perjanjiannya, perjanjian tersebut dibatalkan karena perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh pihak kedua. 2). Dikarenakan kewajiban atas pembayaran pengambilalihan saham tidak dipenuhi oleh pihak kedua, maka kendali atau kepemilikan saham PT. PJA tidak beralih kepada pihak kedua.

Kata kunci : perjanjian, pengambilalihan saham, wanprestasi.

ABSTRACT

The shares takeover is a form of restructuring regulated in constitution number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (hereinafter referred to as UUPT). Agreement on the implementation of the takeover of the shares in the share takeover agreement that can be made by or before a notary, as well as the parties. The shares transfer and control of the company are evidenced by an authentic deed made by a notary. All witnesses as transfer evidence of a company will be obtained by the party taking over after the obligations for the acquisition of shares have been fulfilled. However, in the Central Jakarta District Court Decision Case, Register Number: 52/Pdt.G/PN/Jkt.Pst the defendant as the takeover of the shares of the company has not paid in full payment for the shares, but in the written witness all shares in the company have been transferred from the first party to the second party. So that the formulation of the problem in this study, namely: 1). Is the agreement to take over the shares of a limited liability company that has not been paid in full valid? 2). What are the legal consequences if the agreement of the share takeover payment has not been fully paid? The method used in writing this research is to use normative legal research and use the approach of legislation to answer the formulation of the problem. The results of this research are 1). The share takeover agreement is considered valid and has fulfilled the legal requirements of the agreement in Article 1320 of the Criminal Code, but after the implementation of the agreement, the agreement was canceled due to default by the second party. 2). Because the obligation to pay for the share takeover was not fulfilled by the second party, the control or share ownership of PT. PJA did not turn to a second party.

Keywords: agreement, share acquisition, default.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
ABSTRACT.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penulisan	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Keaslian Penelitian	7
1.6 Metode Penelitian.....	9
1.6.1 Jenis Penelitian.....	9
1.6.2 Pendekatan Penelitian	10
1.6.3 Sumber Bahan Hukum	10
1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	11
1.6.5 Analisis Bahan Hukum	12
BAB II PERJANJIAN PENGAMBILALIHAN SAHAM PERSEROAN TERBATAS	13
2.1 Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	13
2.1.1. Pengertian dan Syarat Sahnya Perjanjian.....	13
2.1.2. Subjek dan Objek Perjanjian.....	15
2.1.3. Tahapan Proses Perjanjian	18
2.1.4. Akibat Hukum Wanprestasi	20
2.2 Tinjauan Umum Tentang Pengambilalihan Saham	21
2.2.1. Konsep dan Pengaturan Pengambilalihan Saham	21
2.2.2. Jenis-Jenis Pengambilalihan Saham dan Akibat Hukumnya	23
2.2.3. Syarat dan Prosedur Pengambilalihan Saham Menurut UUPT dan PP 27/1998.....	24
BAB III PERJANJIAN PENGAMBILALIHAN SAHAM PERSEROAN TERBATAS	30
3.1 Perjanjian Pengambilalihan Saham PT. Parisma Jaya Abadi.....	30
3.1.1. Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Pengambilalihan Saham PT. Parisma Jaya Abadi.....	30
3.1.2. Sahnya Perjanjian Pengambilalihan Saham PT. Parisma Jaya Abadi yang Tidak Terpenuhi	37
3.2 Tahapan Perjanjian Pengambilalihan Saham PT. Parisma Jaya Abadi ..	48

3.2.1. Tahapan Perjanjian Pengambilalihan Saham PT. Parisma Jaya Abadi yang Tidak Terlaksana.....	48
3.2.2. Akibat Hukum Tidak Terpenuhinya Perjanjian Pengambilalihan Saham PT. Parisma Jaya Abadi	52
BAB IV PENUTUP	58
4.1. Kesimpulan.....	58
4.2. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	60